Judul : Polri Restrukturisasi Korps Brimob
Tanggal : Selasa, 16 November 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KOMPAS, SELASA, 16 NOVEMBER 2021

Politik&Hukum | 3

ORGANISASI

Polri Restrukturisasi Korps Brimob

JAKARTA, KOMPAS — Menghadapi sejumlah agenda besar yang diprediksi dapat meningkatkan tensi politik dan konflik dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia merestrukturisasi Korps Brigade Mobil untuk memperkuat pengamanan negara. Pangkat para pimpinan dinaikkan, jumlah personel pun ditambah.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin (15/11/2021), mengatakan, Polri tengah menyiapkan pengembangan organisasi Korps Brigade Mobil (Brimob). Pengembangan yang dimaksud terkait dengan penambahan jumlah personel di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur serta ibu kota negara. Para personel itu akan digerakkan ketika terjadi peningkatan ancaman keamanan dan ketertiban.

Pengembangan organisasi juga terkait dengan peningkatan jabatan pimpinan. Korps Brimob yang selama ini dipimpin tiga perwira tinggi nantinya akan dipimpin delapan perwira tinggi. Pangkat perwira yang menjabat dinaikkan setingkat lebih tinggi.

Komandan Korps Brimob, misalnya, akan dijabat komisaris jenderal atau jenderal bintang tiga. Sebelumnya, Brimob dipimpin jenderal bintang dua berpangkat inspektur jenderal.

"Selain itu, akan ada enam jabatan yang dijabat bintang satu atau brigadir jenderal, di antaranya dua kepala biro, komandan pasukan I untuk Indonesia barat, komandan pasukan II untuk Indonesia tengah, dan komandan pasukan III untuk Indonesia timur," kata Ramadhan.

Pengembangan organisasi Brimob diperlukan untuk menghadapi tantangan kepolisian yang kian kompleks.

Terkait tensi politik

Pengembangan organisasi Brimob itu sebelumnya telah disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Korps Brimob, Minggu (14/11), di Depok, Jawa Barat. Bahkan, usulan pengembangan organisasi itu telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan itu kini ada di Kementerian Sekretariat Negara.

Listyo mengatakan, pengembangan organisasi Brimob diperlukan untuk menghadapi tantangan kepolisian yang kian kompleks. Ia lalu merinci tantangan yang dimaksud, di antaranya akan dimulainya tahapan Pemilu 2024 serentak yang berpotensi meningkatkan tensi politik. Berkaca pada Pemilu 2019, ajang elektoral itu telah memecah belah masyarakat karena pilihan politik.

Selain itu, masih ada gangguan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, dan di Papua akibat kelompok teroris dan kelompok kriminal bersenjata.

Peran Korps Brimob juga diperlukan dalam pelaksanaan World Superbike di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada 2022. Kegiatan tersebut memiliki potensi kerawanan terorisme, unjuk rasa skala besar, hingga mobilisasi masyarakat yang tinggi.

Peneliti bidang keamanan nasional Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sarah Nuraini Siregar memandang, restrukturisasi organisasi dalam rangka pengembangan postur Polri yang lebih baik merupakan hal wajar. Namun, Polri perlu memperjelas ukuran situasi keamanan yang dinilai kian berat dan kompleks sehingga harus menempatkan Brimob di situasi tersebut.

"Seberapa besar potensi gangguan keamanan tersebut sehingga perlu ada restrukturisasi dan penambahan jumlah personel Brimob? Ini harus diperjelas," katanya. (NIA)

PERPUSTAKAAN DPR-RI